

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pajak yang terjadi, yang pada setiap tahunnya selalu saja meningkat. Namun pada kenyataannya sangat banyak dari masyarakat kita yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Pada tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak sampai 31 Desember 2014 sebesar Rp 67,7 triliun. Sementara sampai 24 Maret 2015, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp 6,75 triliun atau baru 9,97 persen.

“Untuk mendukung penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.294,25 triliun, DJP berusaha secara optimal agar tunggakan pajak itu dapat dicairkan,” (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama : 2015) <http://www.cnnindonesia.com>

Padahal pada dasarnya membayar pajak adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negarayang baik. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama

yang potensial baginegara kita untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunannasional. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan harusditingkatkan lagi guna tercapainya tujuan tersebut Telah banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya antara lain seperti sosialisasi perpajakan,meningkatkan kualitas pelayanan pajak, dll.

Namun memang pada kenyataannya upaya upaya yang dilakukan oleh Direktorat jendral Pajak tersebut belum dapat sepenuhnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tetap saja masih banyak yang utang pajaknya masih menunggak. Seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajiban pajaknya , tetapi jika kewajiban pajak tersebut dibayar terlambat , maka hal tersebut tidak dapat dianggap patuh apalagi kalau sampai utang pajaknya menunggak. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihayang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Dan pemerintah memberlakukan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan SuratPaksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No. 19 tahun 2000.

Undang-undang penagihan pajak ini juga diharapkan dapat memberikankepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dankepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya gunamengurangi tunggakan pajak yang timbul. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal lagi dan terus meningkatagar bisa membiayai pembangunan

nasional dan penyelenggaraan roda pemerintah bisa berjalan dengan baik. Selain Undang-Undang yang dapat menyadarkan wajib pajak terhadap tunggakan pajak, peran dari penagihan pajak tentunya juga harus dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak oleh wajib pajak badan di KPP Madya Sidoarjo.

1.2. Penjelasan Judul

1. Analisis

Menurut Wiradi (2009:20) Menjelaskan Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

2. Penagihan Pajak

Menurut Rusdji (2004:6) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

3. Tunggakan pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 40) Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

4. KPP Madya Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak dalam upaya meminimalisir tunggakan pajak wp badan di KPP Madya Sidoarjo?
2. Apakah penagihan pajak berkaitan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP Madya Sidoarjo?

1.4. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak WP Badan di KPP madya Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.

b. Bagi seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga bisa meminimalisir jumlah tunggakan pajak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak wp badan di KPP Madya Sidoarjo & analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Disini peneliti menggunakan data kuantitatif sekunder yang berasal dari data penagihan pajak KPP Madya Sidoarjo.

1.6.2 Ruang Lingkup

Pengertian Pembatasan Penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Pemilihan batasan penelitian yang hendak diteliti haruslah didasarkan pada alasan yang tepat, baik itu alasan teoritis maupun alasan praktis. Alasan tersebut boleh saja bersifat projektif atau berorientasi ke masa depan. Dengan alasan yang tepat tersebut, tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan tepat juga.

Pembatasan masalah ini menyebabkan fokus masalah menjadi semakin jelas, sehingga masalah penelitiannya dapat dibuat dengan jelas juga. Sampai sejauh mana masalah penelitian itu dibatasi ditentukan oleh peneliti sendiri,

Batasan penelitian pada penelitian ini adalah hanya terbatas pada peranan penagihan pajak terhadap tunggakan yang dilakukan oleh WP Badan di KPP Madya Sidoarjo. Jadi hanya seberapa besar tingkat kesadaran dari WP atas tunggakan pajak yang dilakukan terhadap penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo.

1.6.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat dilihat dari analisis kuantitatif secara deskriptif. Pendekatan ini menggunakan statistik deskriptif.

Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan demikian hasil olahan data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi, belum sampai pada tahap generalisasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Analisis kuantitatif deskriptif yang dapat menghasilkan fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Selain itu statistik deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan.

Ciri analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun penghitungan. Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data tersebut. Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa angka-angka maupun gambar-gambar grafik.